



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**RABU, 4 JULI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Bendungan Sengkuang Diaudit**

**ARGA MAKMUR, BE** - Adanya dugaan kelebihan bayar pembangunan bendungan di Desa Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP) membuat Inspektorat Daerah (Ipda) Bengkulu Utara (BU) bertindak, yakni mengaudit proyek tersebut.

Hal ini lantaran pembangunan fisik bendungan tidak sampai 52 persen seperti penilaian yang telah dilakukan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) BU. Sedangkan pihak kontraktor telah menerima uang sebesar Rp 2,9 Miliar dari total Rp 4,9 Miliar anggaran pembangunan

bendungan yang harus selesai akhir 2017 lalu.

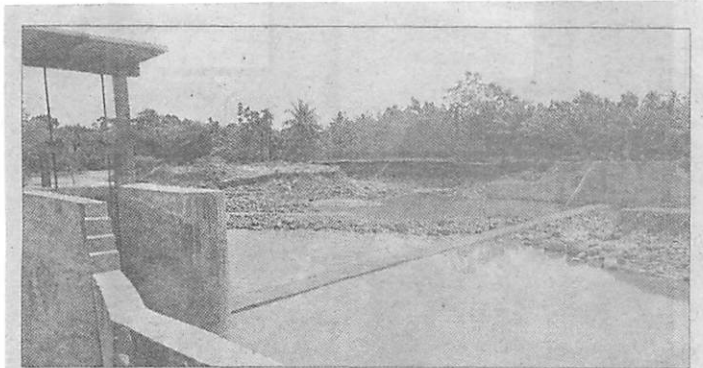
"Dalam audit bendungan Sengkuang yang tidak selesai dikerjakan, kita meminta pendampingan dari BPKP Provinsi Bengkulu. Saat ini, kita masih menunggu surat balasan dari pihak BPKP," ujar Inspektur Ipda BU, Dullah SE.

Ia mengaku belum dapat berbicara banyak mengenai permasalahan yang menyebabkan proyek tidak selesai oleh pihak kontraktor. Karena hasil audit belum didapati pihaknya dari BPKP.

"Audit ini dilakukan secara terbuka. Hasilnya nanti kalau sudah kita dapat, akan kita paparkan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Kades Sengkuang, Halimun menyampaikan, akibat tak selesainya pekerjaan Bendungan Sengkuang itu membuat kerugian bagi masyarakat. Terutama, tanah masyarakat yang tergerus abrasi akibat longsor sepanjang aliran sungai, lantaran belum dipasangnya pelapis tebing atau beronjong.

"Kerugian ditanggung masyarakat setempat. Karena tanah tergerus



Beginilah kondisi bendungan di Desa Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung Palik yang tidak selesai dikerjakan 2017 lalu.

longsor lantaran tidak ada pelapis tebing yang dipasang setelah pekerjaan itu dilaksanakan," terangnya.

Bahkan, ia mengaku akan membawa persoalan itu pihak penegak hukum jika tidak diselesaikan DPUPR BU. "Masyarakat sudah resah dengan longsor yang terjadi. Kalau juga tidak penyelesaian, kami rencana akan membawa kasus ini ke pihak berwajib. Belum lagi kerugian bagi petani lantaran bendungan yang dibangun tidak dapat berfungsi," pungkasnya. (816)